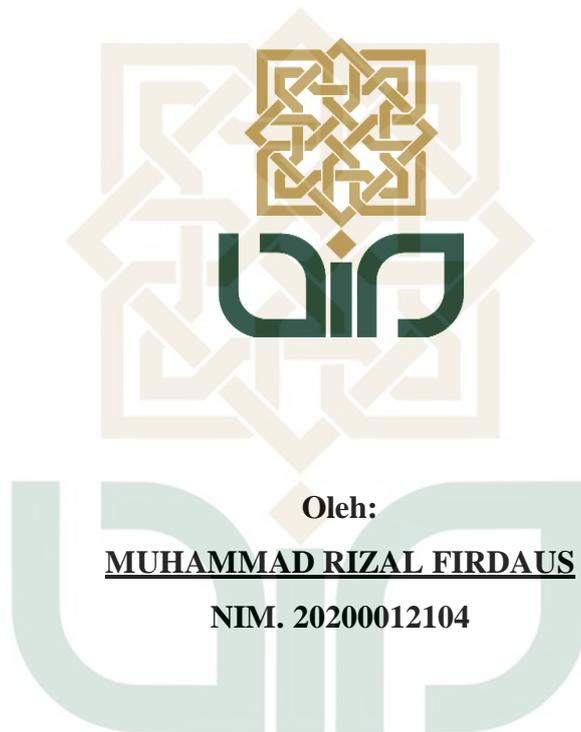


**KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN DANA DESA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT PERSPEKTIF *MAQAŞID*
SYARPAH MUHAMMAD ALAL AL-FASI DI DESA MANYAR
KABUPATEN LAMONGAN**



Oleh:

MUHAMMAD RIZAL FIRDAUS

NIM. 20200012104

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Interdisciplinary Islamic Studies
Program Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-359/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : Keberpihakan Kebijakan Anggaran Dana Desa dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Perspektif Maqasid Syariah Muhammad Alal Al-Fasi di Desa Manyar Kabupaten Lamongan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZAL FIRDAUS, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012104
Telah diujikan pada : Senin, 04 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 664c09b1e082f



Penguji II

Ahmad Norma Pemata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 664dc46af2883



Penguji III

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 663094dfe949b



Yogyakarta, 04 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66544574ab0e9

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Firdaus

NIM : 20200012104

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

aya yang menyatakan,



Muhammad Rizal Firdaus

20200012104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Firdaus

NIM : 20200012104

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizal Firdaus

20200012104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN DANA DESA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT PERSPEKTIF *MAQASID*
SYAR'AH MUHAMMAD ALAL AL-FASI DI DESA MANYAR
KABUPATEN LAMONGAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizal Firdaus
NIM : 20200012104
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Phil Ahmad Norma Permata, MA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keberpihakan kebijakan anggaran yang berkaitan dengan pengembangan potensi masyarakat. Fokus dari penelitian ini yaitu menelaah keberpihakan kebijakan anggaran dana desa serta bagaimana pengembangan potensi masyarakat di Desa Manyar. Adapun dana desa yang dimaksud adalah anggaran yang diberikan kepada setiap desa melalui pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan yang ada di desa. Kebijakan dana desa sudah disahkan sejak tahun 2014 oleh pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kualitatif-deskriptif merupakan jenis penelitian yang dipilih dalam mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan, adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi yang mana dalam penelitian subyek penelitian diantaranya ; Kepala Desa Manyar, Sekretaris Desa Manyar, Kasi perencanaan, Ketua BPD, Ketua LPM, dan juga beberapa informan dari tokoh masyarakat dan masyarakat desa Manyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam mengolah data yang diperoleh dari lapangan yakni mulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data/penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk metode validasi data menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang telah dihimpun.

Akhir dari penelitian ini mengenai keberpihakan kebijakan dana desa di desa Manyar menunjukkan beberapa temuan, yakni: (1) Pemerintah desa dalam hal ini sebagai pelaksana regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat mengelola dana desa hanya berwenang untuk mengalokasikan dan mengimplementasikan program sesuai pagu anggaran yang telah ditentukan. (2) Pengembangan potensi masyarakat di desa manyar menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana desa terutama pada potensi di bidang pertanian dan perikanan. Dalam penelitian ini menunjukkan potensi utama desa manyar adalah di sektor pertanian dan perikanan tambak. Pemerintah desa memberikan porsi penuh untuk pengembangan potensi tersebut hal tersebut juga sejalan dengan peruntukan anggaran dana desa yang harus digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 30%. (3) Dalam penyusunan peruntukan dana desa disusun berdasarkan kebutuhan mendasak yang sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa hal ini sesuai dengan pandangan Alal al-Fasi tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* yakni dalam hal pengelolaan pemerintahan harus berorientasi kepada kemaslahatan dan demokratis. Hal ini juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom yaitu model inkremental yang mana pengambilan keputusan berdasarkan data empiris dan mempertimbangkan rasioanlitas komprehensif Masyarakat diberikan ruang yang cukup dalam penentuan pengalokasian anggaran dana desa, meskipun pihak pemerintah desa sudah mempunyai orientasi pembangunan yang tersusun dalam program unggulan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau RABDes namun masyarakat bisa memberikan aspirasi yang sesuai dengan kondisi rill di lapangan.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran, Dana Desa, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Alal Al-Fasi

MOTTO

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami Wahyuukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”

QS. Al-Anbiyā: 73



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada:

Almamater Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Saya
Banggakan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya. Yang telah mempertemukan penulis kepada jalan kejayaan Dinul Islam.

Perjuangan serta kerja keras akan menentukan keberhasilan dan dalam perjuangan ini penulis sangat menyadari bahwa kekuatan individu sangat terbatas sehingga dalam mencapai keberhasilan ini penulis mendapatkan banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr.phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Phil Ahmad Norma Permata, MA selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar, selalu memberikan, arahan, motivasi dan ilmu serta penuh dengan ketulusan dalam membimbing, hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I dan Ibu Dr. Subi Nur Isna, M.A selaku Pembina Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2021/2022 beserta seluruh dosen Pascasarjana yang memberikan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca yang budiman.

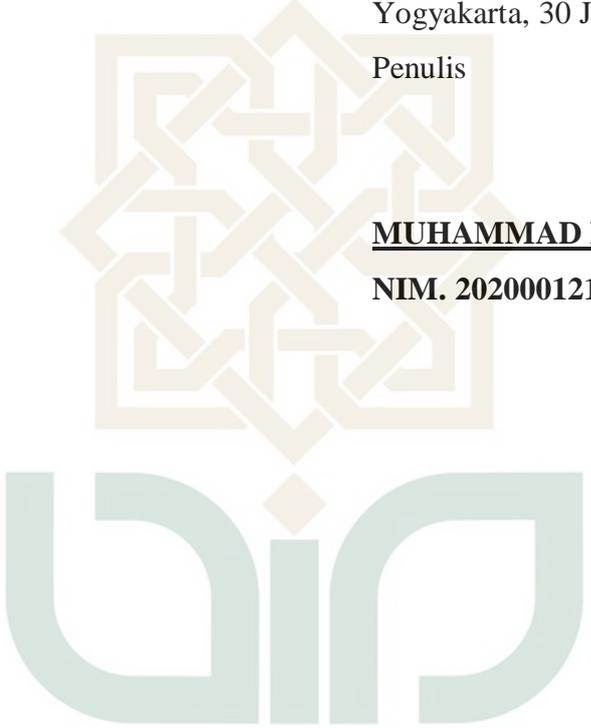
Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Penulis

MUHAMMAD RIZAL FIRDAUS

NIM. 20200012104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	20
1. Sumber Data	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3. Teknik Analisis Data.....	22
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Teknik Keabsahan Data	22
F. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Konsep Dasar Kebijakan	26
1. Kajian Kebijakan Anggaran dalam Potensi Masyarakat ...	29
a. Terminologi Keberpihakan Kebijakan Pemerintah	29
2. Model dan Pendekatan dalam Proses Kebijakan	

Publik di Indonesia.....	36
3. Desa.....	43
4. Dana Desa.....	47
5. Kebijakan Anggaran Pemerintah dalam Perspektif Islam	59
6. Kebijakan Islam dalam Pandangan <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i>	63
7. Konsep <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i> Alal Al Fasi.....	66
BAB III DESKRIPSI DAN PENYAJIAN DATA	71
A. Gambaran Umum Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	71
1. Letak Geografis	71
2. Sejarah Desa Manyar	72
3. Struktur Pemerintah Desa Manyar	74
BAB IV POTRET KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN DANA DESA	92
A. Potret Keberpihakan Kebijakan Anggaran Dana Desa APBDes Dana Desa Manyar 2023	92
1. Proses Penyusunan Anggaran.....	98
B. Keberpihakan Kebijakan Program Kerja Pemerintah Desa Manyar dalam Pengembangan Potensi Masyarakat	103
1. Proses Penyusunan	103
2. Proses Pengalokasian.....	112
C. Keberpihakan kebijakan anggaran Dana Desa Perspektif <i>maqāṣid al-Syarī'ah</i>	119
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran dan Rekomendasi.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130
PROFIL PENULIS	141

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Pengeluaran Anggaran Perspektif Islam, 32.
- Tabel 2 Nama Kepala Desa yang Pernah Menjabat, 70.
- Tabel 3 Susunan Pemerintah Desa Manyar, 71.
- Tabel 4 Susunan Badan Permusyawaratan Desa, 73.
- Tabel 5 Susunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Manyar, 73.
- Tabel 6 Susunan Pengurus Bumdes Desa Manyar, 74.
- Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan RT.RW, 75.
- Tabel 8 Tamatan Sekolah Masyarakat, 76.
- Tabel 9 Mata Pencaharian dan Jumlahnya, 86.
- Tabel 10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyar, 96.
- Tabel 11 Framework Kebijakan Program Lintas Perspektif, 105.
- Tabel 12 Framework Penyusunan Keberpihakan Kebijakan
Program Pengembangan Potensi Masyarakat, 110.
- Tabel 13 Belanja Desa menurut PP Pasal 100 No. 11/2019, 115.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tradisi Jedoran Desa Manyar, 84.

Gambae 2 Tradisi Wiwit Padi Desa Manyar, 85.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa, Terminologi Dana Desa jelaskan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan kemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya program dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan serta pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹ Adapun pemanfaatan dana desa disesuaikan dengan kondisi desa, kebutuhan masyarakat desa yang mendesak dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat.

Pemerintah sebagai pemegang penuh wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan punya andil besar dalam mengatur dan mengambil keputusan terkait kebijakan apa yang akan direalisasikan guna untuk memecahkan suatu masalah, seperti yang diungkapkan Anderson, Kebijakan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan seseorang pelaku dengan tujuan tertentu untuk memecahkan

¹ Lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

masalah, selanjutnya Anderson mengklasifikasikan kebijakan, *policy*, menjadi dua: substantif oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.²

Institusi pemerintahan erat kaitannya dengan urusan publik, pemerintah punya otoritas untuk mengatur, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi kesenjangan, maka tak heran jika pemerintahan punya andil dalam menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Segala sesuatu yang lahir dari kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan, sesuai dengan kaidah “*Taşarraf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maslahah*” yang artinya “Kebijakan seorang pemimpin kepada masyarakat harus berorientasi pada kemaslahatan” kaidah ini mengungkapkan bahwa, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijakan harus bertujuan pada kebaikan bersama atau kepentingan umum. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatan.³

Dalam Islam, segala aspek tatanan masyarakat ada aturan dan pedomannya terlebih lagi tentang kepemimpinan, menjadi hal yang sakral dalam Islam, seperti tentang pemimpin yang adil sudah termaktub dalam al Qur’an surat An Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Good Governancy*, (Gorontalo : UNG, 2018), 8.

³ Imam Masbuqin, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi penulajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴

Pemimpin punya andil besar dalam roda pemerintahan, segala regulasi yang ada di masyarakat tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Dalam hal ini kebijakan anggaran kerap menuai gesekan dalam penentuan serta alokasi anggaran bagi masyarakat, maka nilai-nilai Islam sudah selayaknya menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan serta keputusan yang akan diambil. Lantas apakah setiap penentuan anggaran yang akan direlaisasikan mempertimbangkan alasan teologis ataukah hanya berjalan sesuai dengan dinamika di lapangan.

Desa Manyar adalah desa yang memiliki potensi alam yang besar, namun jika dibandingkan dengan desa lain kemajuannya sangat tertinggal. Kondisi ini menjadikan kebingungan masyarakat tentang fungsi anggaran dana desa. Banyaknya dana desa belum bisa diserap secara maksimal oleh pemerintah desa manyar hal ini terbukti dengan kurang meratanya pembangunan dan pengalokasian anggaran.

Data APBDes Desa Manyar pada tahun 2021,⁵ menunjukkan anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat melalui pemkab sebesar Rp806.224.000 Juta, jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Quran, Al Quran dan Terjemah Kementerian Agama Lajnah Pentashih Mushaf Al Quran 2019.

⁵ Dokumentasi Desa Manyar, 2021

berjumlah Rp703.045.000 kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp804.032.900⁶. Dana tersebut termasuk jumlah yang besar bagi setingkat desa. Dengan jumlah yang besar itu setiap tahunnya perubahan yang nampak dari adanya anggaran dana yang cukup besar tersebut belum nampak secara signifikan baik di ranah infrastruktur maupun suprastruktur. Dengan besarnya dana tersebut maka pengalokasian dan pendistribusian sudah selayaknya dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan prinsip yang akuntabel dan transparan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

Keberadaan anggaran dana desa yang setiap tahunnya harusnya berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia, hal ini juga tertuang dalam UU sebagai dasar yuridisnya, selain itu penggunaan dana desa sudah semestinya menggunkan konsep kemaslahatan yang mana tidak adanya kesenjangan setiap porsi anggaran. Sebagaimana dijelaskan di atas idealnya pemerintah desa mengemban amanah dalam mensejahterakan rakyat, namun fakta realitasnya menyebutkan bahwa hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Faktanya kondisi riil baik berupa fakta statistik seperti pengangguran, disparitas antara masyarakat dengan kondisi sejahtera dan prasejahtera cukup tinggi dan kondisi sumber daya alam maupun fakta lain. Dari sini menjadi hal yang penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah desa Manyar sehingga hal tersebut bisa terjadi.

Selanjutnya, terkait dengan konsepsi teoritis kebijakan pada kesejahteraan rakyat, bahwa secara teoritis dan secara amanat Undang-undang kebijakan yang

⁶Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, Sekaran dalam Angka Tahun 2018.

berorientasi pada kesejahteraan rakyat menjadi kewajiban penyelenggara negara di berbagai tingkatan. Dari Undang-undang hingga teori kebijakan mendorong adanya keberpihakan kebijakan ada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun cara terbaik dalam mencapai hal tersebut dapat diraih melalui berbagai pendekatan salah satunya adalah pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, pada titik ini tinjauan mengenai keberpihakan kebijakan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* perspektif Alal Al-Fasi penting untuk dilakukan.

Dalam pemikirannya Al Fasi mencoba mengkontekstualisasikan konsep tentang *maqāṣid al-Syarī'ah*, Al Fasi dalam hal ini banyak bersandar pada Asy-Syatibi sebagai pencetus awal *maqāṣid al-Syarī'ah*, akan tetapi Alal Al-Fasi tidak sertamerta mengambil semua pemikiran Asy-Syatibi, secara umum Asy-Syatibi hanya membuat konsep awal mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah* dan menjadi ilmu yang independen dari Ushul Fiqh. Lebih lanjut pemikiran Alal Al-Fasi dirasa cukup bisa dikaitkan dengan konteks hari ini terlebih dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, lebih spesipik lagi tentang bagaimana proses perencanaan mengenai kebijakan anggaran yang erat kaitannya dengan hak-hak manusia dan konsepsi tentang keadilan.

Maka dari itu penelitian ini mencoba mempersoalkan serta menganalisis sejauh mana keberpihakan kebijakan anggaran Dana Desa yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* prespektif Asy-Syatibi, serta sejauh mana upaya pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberpihakan anggaran dana desa dalam pengembangan potensi masyarakat prespektif *maqāṣid al-Syarī'ah* Muhammad Alal Al-Fasi?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait bagaimana keberpihakan kebijakan anggaran dana desa dalam pengembangan potensi masyarakat Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* Alal Al Fasi.

Secara umum penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum mengenai bagaimana seharusnya kebijakan anggaran dana desa direalisasikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, baik untuk masyarakat umum dan akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini secara formal dapat memperkaya khazanah keilmuan kebijakan publik khususnya dalam pengalokasian anggaran dana desa.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberpihakan kebijakan anggaran dana desa dan proses pengalokasian anggaran perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.
 - c. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi atau acuan bagi penelitian kedepan yang mempunyai bidang

yang sama yakni pada kebijakan anggaran khususnya pada anggaran dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun manfaat secara praktis khususnya Bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat, kementerian PDPT, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program dan pembagian porsi anggaran.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan informasi tentang pentingnya kebijakan anggaran dan keberpihakannya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi pengelola perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan dalam pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan anggaran baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional yang berpijak pada perspektif Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam pengamatan peneliti penulis bukan satu-satunya yang meneliti tentang hal ini terdapat penelitian lain yang berkaitan dengan kebijakan anggaran perspektif maqāṣid al-Syarī'ah. Maka oleh karenanya peneliti akan menganalisis dan mereview hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai lingkup penelitian yang sama dengan penelitian ini.

1. Kebijakan dan Maqasid Syariah

1. Penelitian pertama dari Firman Muhammad Arif, tentang Anggaran belanja daerah berbasis maqāṣid al-Syarī'ah: Analisis Relasi Anggaran Kota Palopo.

Pada kesimpulan penelitian ini memberikan gambaran tentang integrasi anggaran dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang memiliki kecenderungan mengenai internalisasi *maqāṣid al-Syarī'ah* sehingga maqasid dijadikan dasar stimulus prioritas kebutuhan dasar dan penggunaan anggaran bukan bersifat estetis (pelengkap) meskipun seirama hirarkinya.⁷ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yakni pada konsep penganggaran dan kesesuaiannya *maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan pada penelitian ini lebih diarahkan kepada keberpihakan anggaran dana desa dalam proses penganggaran dan turunan program dari adanya anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dalam tinjauan perspektif Islam.

2. Kartini, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dalam Perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang).

Pada penelitian ini dipaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas perikanan kabupaten Pinrang dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini yakni pengelolaan anggaran Dinas Perikanan telah dikelola dengan baik melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh dinas perikanan kabupaten pinrang. Dalam penentuan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang selalu melibatkan masyarakat. dalam penelitian ini ditemukan hasil baha akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh dinas perikanan telah sesuai dengan lima prinsip dalam

⁷ Firman Muhammad Arif, *Anggaran belanja daerah berbasis maqasid Al Syari'ah: Analisis Relasi Anggaran Kota Palopo*. Jurnal INFERENSI Jurnal Penelitiann sosial keagamaan Vol. 13, No. 1 Juni 2019.

konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu, *hifẓ ad-Dīn*, *hifẓ al-Nafs*, *hifẓ al-'Aql*, *hifẓ al-Māl*, dan *hifẓ al-Nasl*.⁸

3. Penelitian dari Mashur Imam, *Keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah daerah perspektif maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda⁹. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa dalam adanya keberpihakan pengalokasian anggaran menggunakan beberapa prinsip berikut yakni pertimbangan holistik, *openness*, *multy-dimensionality*, dan *purposefulness* dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.¹⁰ Kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian yakni fokus kajiannya yakni pada lingkup keberpihakan kebijakan anggaran dan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*. Namun yang berbeda dari penelitian ini ialah lebih di fokuskan pada pengembangan potensi ekonomi masyarakat selain itu dalam ranah prinsip *maqāṣidnya* menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ahnya* Jaser Auda, selain itu obyek kajiannya adalah kebijakan anggaran pemerintah daerah atau APBD yang mana masuk dalam lingkup daerah.
4. Keempat, dari Abdul Wahab, dalam *Jurnal Tsaqofah* Vol. 12, No. 1, Mei 2016 yang berjudul *Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional)*. Pada artikel jurnal ini memaparkan tentang urgensinya perihal perlindungan sosial yang merupakan tujuan utama dari prinsip ekonomi syariah untuk negara. Menurut penelitian ini adanya konsep distribusi dan pembatasan memonopoli pasar oleh pemilik modal, kedua konsep ini penting

⁸ K Kartini, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dalam Perspektif Maqashid Shariah (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang)," 2020, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17982/>.

¹⁰ Mashur Imam, *Keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah daerah perspektif maqasid syariah Jasser Auda* Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember , 2021.

untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada perlindungan pasar tradisional.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah terkait dengan fokus kajiannya yang mempertakan kebijakan pemerintah pada ekonomi masyarakat. Adapun dengan perbedaannya Penelitian ini secara spesifik kepada keberpihakan kebijakan anggaran dana desa perspektif *maqāṣid al-Syatī'ah* di Desa Manyar.

5. Abdul Wahab, Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). Hasil dari penelitan ini memaparkan urgensi dari kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini adalah tujuan utama ekomoni Islam untuk peradaban manusia (negara). Diantara ide demi terciptanya kesejahteraan masyarakat maka harus direvitalisasi, dalam penelitian ini mempersempit gerak para pemilik modal untuk memonopoli pasar dan adanya distribusi pendapatan menjadi konsep yang penting untuk dijadikan landasarn dan pertimbangan dalam menentukan dan menyusun kebijakan yang berpihak pada keberadaan pasar tradisional.

Penelitian yang dilakukan Abdul Wahab terdapat strategi untuk merealisasikan program dari sebuah kebijakan yang berpihak pada ritel tradisional. Namun, konsep tersebut akan sia-sia jika kebijakan publik tidak di realisasikan yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi pasar ritel. Maka adanya distibusi pendapatan dan menutup monopoli pasar melalui

¹¹ Abdul Wahab, Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). Jurnal Tsaqofah Vol. 12, No. 1, Mei 2016.

kebijakan publik oleh pemerintah adalah cara yang bisa dilakukan untuk menembangkan ekonomi dengan pasar tradisional.¹²

2. Kebijakan dan dan Pemerintahan

1. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, “Pemekaran Daerah dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia”, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol 7, No 1 2010.

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya dalah menyoroti beberapa model dan problematika yang terjadi pada governabilitas lokal yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyanto adalah penelitian pustaka, tentu berbebeda dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah di Indonesia pada kenyataanya menimbulkan banyak kelemahan, salah satunya, mencakup aspek politik legal hukum dan manajerial pemerintahan dapat dijelaskan bahwa kelemahan ini mengarah pada masalah governability di tingkat lokal. Problem governability adalah situasi yang menunjuk pada proses memperlemah kapasiatas institusi institusi pemerintah govering dan masyarakat governad dalam hal ini melakukan peningkatan pembangunan daerah. Selain itu, dalam kesimpulannya juga dijelaskan maraknya *bureaucratic and political rentseeking* dan praktik korupsi di tingkat lokal

¹² Abdul Wahab, “Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional).,” *Jurnal Tsaqofah* 12 (2016): 167–86.

merupakan dampak pelemahan pemerintahan birokrasi dan demokrasi sendiri.¹³

2. Slamet Joko Utomo, Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).

Penelitian ini menunjukkan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto secara spesifik bisa dilihat dari tiga hal yaitu kepersertaan, penguasaan materi musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan jenis partisipasinya. Pada penelitian ini dipaparkan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran sangat optimal hal ini bisa dilihat dari perwakilan masyarakat untuk mempertahankan usulannya, meskipun apa yang disampaikan peserta tidak rasional. Pada penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan oleh Slamet Joko Utomo adalah tingkat partisipasi publik dalam perencanaan anggaran pada forum perumusan anggaran, berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan yakni fokus pada pengelolaan anggaran ditinjau dari kebijakan publik dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.¹⁴

3. Ikkal Ramzani P dkk, Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau dari *maqāṣid al-Syarī'ah*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penyusunan dana otonomi khusus dan penggunaannya, serta untuk mengetahui penerapan

¹³ Mardyanto Wahyu Tryatmoko, "Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Politik LIPI* 07 (2010).

¹⁴ Selamet Joko Utomo, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa," *Jurnal Mediatrend* 10, no. 1 (2015): 19–31, <http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687>.

model penyusunan dan penggunaan anggaran dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari prespektif *maqāsid al-Syarī'ah*. Pada penelitian ini didapatkan bahwa penyusunan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan pada beberapa bidang insfrastuktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keistimewaan aceh. Pada penerapan dana otonomi khusus belum sepenuhnya mendomonasi dimensi dharuriyah yang terdiri dari perlindungan agama (*hifz ad-Dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*). Perlindungan akal (*hifz al-'Aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), perlindungan harta (*hifz al-Māl*), dan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-Bi'ah*) sehingga dana otonomi khusus selanjutnya dapat diproyeksikan untuk meningkatkan tiga dimensi secara hirarki yaitu, dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah sebagai basis nilai kebijakan pembangunan Aceh di masa depan yang berlandaskan Syariat Islam.¹⁵

4. Siti Sanisah, Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol 3 No 1 Maret 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian *Policy Research* dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan dua temuan, yang pertama adalah aktivitas perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi masalah pendidikan guna dipecahkan melalui

¹⁵ Ikbal Ramzani,P, Muhammad Yasir Yusuf, and Hafas Furqani, "Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau Dari Maqashid Syariah)," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 58–81, <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627>.

sejumlah program alternatif, sedangkan penganggaran merupakan aktivitas yang dilakukan dengan maksud menguji kelayakan hasil perencanaan program pendidikan dengan pembiayaan yang diajukan eksekutif dan cenderung didominasi pendekatan *political planning*. Dari penelitian ini menunjukan adanya rekomendasi pengelolaan kebijakan anggaran pendidikan dengan memperhatikan lima tepat (tepat cara, tepat waktu, tepat pelaksana, tepat target dan tepat lingkungan, selain itu, menerapkan model implementasi yang menitikberatkan pada prinsip interaktif, partisipatif, manajemen pendidikan dan *good governance* dan melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan *participatory assessment*.¹⁶

5. Agung Maulana dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang berorientasi pada agama dan penjagaan harta lebih tinggi daripada alokasi anggaran untuk penjagaan akal (*hifz al-'Aql*) dalam penelitian ini terdapat 14 post anggaran yang sudah dikategorisasikan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dari 14 post pengeluaran dan

¹⁶ Siti Sanisah, "Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)* 3, no. 1 (2015): 101, <https://doi.org/10.21009/jpeb.003.1.5>.

presentasinya terhadap 70% dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan desa terlihat bahwa desa cilebut barat menjadikan agama dan harta sebagai unsur yang paling dilindungi masing-masing sebesar 40,62% dan 49,74%, post yang paling mendukung penjagaan agama dan harta adalah adanya betonisasi jalan desa.¹⁷

6. Sayyidatul Fitriyah dkk, Perbandingan APBN Pemerintah Era Presiden SBY- JK dan Jokowi – JK: Analisis Belanja Negara Prespektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian adalah studi komparasi yakni membandingkan masa pemerintahan era SBY dan era Jokowi dengan hasil sebagai berikut bahwa pada masa era SBY dan Jokowi telah memenuhi tiga tingkat moderat, namun masih banyak yang tidak sesuai dengan urutan dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagaimana mestinya. Pada masa SBY, anggaran belanja dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* lebih diprioritaskan pada *hifẓ al-'Aql*, *hifẓ al-Nafs* dan *hifẓ al-Māl*, kemudian pada *hifẓ ad-Dīn* dan *hifẓ al-Nasl*, tingkat *maqāṣid al-Syarī'ah* yang sesuai urutan yakni *hifẓ al-Nafs* pada tahun 2010 dan 2011 dan pada *hifẓ al-'Aql* pada tahun 2013. Sedangkan pada masa presiden Jokowi prioritas anggaran dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* terlihat pada *hifẓ al-Māl* dan *hifẓ al-Nafs*, kemudian pada *hifẓ al-'Aql* dan *hifẓ ad-Dīn* yang tidak terlalu jauh anggarannya, kemudian terakhir

¹⁷ Ayu Andini Maulana, Agung, Ahmad Rizki Zulfikar, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah," no. 32 (2019): 68–84.

hifd-nasl. Tingkat *maqāsid al-Syarī'ah* yang sesuai urutan yakni *hifz al-'Aql* pada tahun 2015, 2016, dan 2018.¹⁸

7. Lianastasia Melempi, dkk, Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Pada penelitian ini titik fokusnya adalah pada implementasi kebijakan anggaran, dalam hal ini terdapat 4 dimensi anggaran, yakni dimensi komunikasi, dimensi sumber daya manusia, dimensi disposisi, dan dimensi birokrasi. Empat dimensi ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Adanya empat dimensi tersebut sangat penting dalam implementasi kebijakan. Bahwa komunikasi merupakan aspek awal yang harus ada agar pelaksanaan kebijakan bisa efektif. Kedua, sumber daya kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan atau penerapan kebijakan. Ketiga, disposisi, dimensi yang ketiga ini berkenaan dengan kesediaan atau komitmen dan konsistensi dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar serta demokratis dalam pelaksanaannya. Keempat, menurut Edward III, dimensi penting dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi dalam struktur birokrasi terdapat dua aspek penting yakni SOP, dan Struktur organisasi. Dari hasil

¹⁸ Sayyidatul Fitriyah, Tika Widiastuti, and Sri Herianingrum, "Perbandingan Apbn Pemerintah Era Presiden Sby – Jk Dan Jokowi – Jk: Analisis Belanja Negara Perspektif Maqāsid Syari' Ah," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i1.219>.

penelitian di desa Tobelos ini ditemukan bahwa dimensi yang paling lemah adalah dimensi disposisi sedangkan dimensi lain masih belum optimal.¹⁹

8. Rini Gusliana Mais, Lini Palindri, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengeleola Keuangan Desa

Pada penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di pemerintah Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa suka damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa suka damai telah membuat laporan keuangan dan telah mempublikasikan dengan baik. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi dari prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Baik pemerintah desa ataupun BPD telah melakukannya dengan mengadakan musyawarah atau rapat untuk menyampaikan atau melaporkan mengenai kegiatannya.²⁰

9. Yamulia Hulu, dkk, Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

¹⁹ Lianastasia Malempi, Martha Ogotan, and Salmin Dengo, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Selatan," *Jurnal Administrasi Publik Unsrat* 5, no. 74 (2019).

²⁰ Rimi Gusliana Mais and Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>.

Dalam penelitian ini mengungkap pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan mendeskripsikan faktor – faktor yang menghambat pengelolaan keuangan dana desa. Dalam penelitian ini menunjukan pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa, selain itu, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam perumusan anggaran. Dalam hal ini pemerintah desa lebih dominan dalam merancang anggaran kegiatan. Selain itu didiapatkan pengelolaan anggaran anggaran difokuskan pada pembangunan jalan, sementara pembangunan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Dalam penelitian ni juga diungkapkan terkait faktor pendukung pengelolaan dana desa diantaranya adanya dukungan dari kebijakan yang lengkap, sosialisasi pengelolaan dana desa, dan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dana desa.²¹

10. Ni Nyoman Alit Triani dan Susi Handayani, *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan adanya perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang belum mumpuni. Dalam hal ini praktik pengelolaan keuangan dana desa sudah mempertimbangkan RPJM dan RKP desa. Aspek transparansi penggunaan dana desa telah terpenuhi hampir seluruh desa di

²¹ Yamulia Hulu et al., “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu -Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54, <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>.

Jawa Timur dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho di tempat strategis, selain itu adanya prasasti atau papan informasi tentang bukti pembangunan desa merupakan hal lainnya sebagai bentuk transparansi. Umumnya di Jawa Timur penggunaan dana desa banyak diprioritaskan untuk pembangunan drainase dan jalan desa.²²

Dari temuan penulis tentang penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih komprehensif mengenai proses penganggaran, implementasi anggaran dana desa yang difokuskan pada pengembangan potensi masyarakat desa. Adanya Dana Desa sebagai bentuk amanat pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemerintah desa sebagai obyek utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan difokuskan pada term kebijakan publik dan nantinya akan difokuskan lagi pada kebijakan anggaran karena selama ini dalam hasil penelurusan penulis, penelitian yang ada fokus pada bagaimana keterkaitan atau anggaran dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Selain itu, yang utama dari penelitian ini adalah adanya partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan kebijakan, penyusunan anggaran, implementasi, hingga pada evaluasi kebijakan di tingkat Desa. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan lebih diarahkan kepada penggunaan *maqāsid al-Syarī'ah* dalam kebijakan anggaran yang mana akan

²² Ni Nyoman Alit Triani and Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.

diteliti sejauh mana orientasi anggaran pada lima aspek *maqāṣid al-Syarī'ah* dan juga internalisasi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pemerintahan khususnya pada proses penganggaran.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa data tertulis, lisan dari para narasumber atau pelaku yang sedang diamati. Sumber utama dari penelitian ini didapatkan dari studi lapangan (*field research*) yakni serangkaian metode pengumpulan data dalam metode penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif yakni upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Artinya, Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan yang ada yang kemudian mengaitkan dengan variabel-variabel yang ada.²³ Dengan metode ini, peneliti melihat berbagai fakta di lapangan atau fenomena yang ada melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada berdasarkan apa yang diamati.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer sebagai data utama yang didapatkan oleh peneliti dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan narasumber yakni pihak pemerintahan desa dan masyarakat. Data primer ini meliputi hasil dari observasi partisipatoris untuk mendapatkan data pokok yang ada di lapangan yang digunakan dalam

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 26.

penelitian.²⁴ Selain menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian langsung peneliti juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian yang sudah ada seperti disertasi, tesis, buku dan laporan penelitian.²⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data lapangan yakni wawancara dan observasi. Adapun data yang didapatkan tersebut berasal dari berbagai sumber mulai dari gambar, kegiatan, tempat, dan lainnya. Mengingat banyaknya data yang akan diperoleh maka proses penggalian datanya akan dilakukan dengan menggunakan cara yang beragam namun secara garis besar menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam indeph, dokumentasi dan observasi.²⁶ Selanjutnya, tidak semua data diperoleh dari observasi di lokasi penelitian. Oleh karenanya, perlu adanya wawancara mendalam kepada narasumber yang mengetahui tema ini secara menyeluruh atau terlibat dalam obyek penelitian. Adapun wawancara yang perlu dilakukan mengingat kita perlu mengetahui gejala, fakta, peristiwa, atau realita. Dengan adanya wawancara yang mendalam peneliti akan mengetahui maksud pemikiran, persepsi, perasaan, pikiran orang dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.²⁷

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 227.

²⁵ Ali Maksum, *Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*, Jurnal Cakrawala Kependidikan, 2012.

²⁶ H.B. Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian* (Universitas Sebelas Maret, No 1 Tahun IV 1988), 19.

²⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2010), 116.

Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Manyar, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan pagu anggaran dalam APBDes, dan Masyarakat Desa Manyar .

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-kualitatif dari informasi dan data-data yang diperoleh. Setelah data dan informasi yang diperoleh terkumpul nantinya peneliti akan melakukan pemilahan-pemilahan yang nantinya akan didapatkan informasi yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun analisis data ini digunakan untuk menyusun secara sistematis hasil penelitian agar mampu dipahami dengan baik gambaran obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Terkait subyek penelitian peneliti akan fokus kepada Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh masyarakat sebagai pihak yang menentukan pengalokasian anggaran dana desa.

5. Teknik Keabsahan Data

Tahap awal saat penelitian, dianggap orang asing adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh peneliti maka dengan demikian informasi yang akan didapatkan nantinya tidak akan menyeluruh dan kemungkinan masih banyak yang ditutup-tutupi. Maka dari itu, peneliti harus cermat dalam melakukan penelitian, peneliti harus melakukan pengecekan keabsahan data dari hasil penelitian dan

kondisi riil yang ada di lapangan.²⁸ Maka dari itu untuk mendapatkan keabsahan data perlu adanya triangulasi wawancara, yakni wawancara tidak hanya dari satu pihak akan tetapi interview kepada beberapa pihak yang terlibat guna untuk mendapatkan pandangan lain terkait tema penelitian.

Selain melakukan triangulasi data untuk menunjang data yang diperoleh kredibel maka seorang peneliti harus meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan artinya peneliti harus mengecek secara komprehensif data yang diperoleh sehingga tingkat keakuratannya bisa dipertanggung jawabkan. Dengan demikian peneliti akan bisa mengetahui data yang sudah diperoleh itu salah atau tidak. Selain itu, dengan mengecek kembali data yang diperoleh maka peneliti akan mampu memberikan gambaran kondisi obyek penelitian serta data yang akurat dan tersusun secara sistematis dari apa yang diamati.²⁹

Dari beberapa usaha penelitan sebagaimana yang disebutkan diatas peneliti berharap data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan dari penelitian lapangan ini dan mendapatkan data yang kredibel dan absah.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut ini sistematika pembahasan akan menjelaskan kerangka penelitian yang nantinya akan membagi dalam dua pembahasan yakni pembahasan secara teoritis dan pembahasan analisis yang didasarkan pada temuan saat penelitian

²⁸ Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Peneliti Kualitatif*, (Direktorat File UPI Pdf), Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), 33.

²⁹ Ibid., 27.

yang diperoleh di lapangan yang berguna untuk memudahkan dalam penyusunan tesis ini, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan, pada bab pertama yakni pendahuluan berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian yang nantinya akan dirumuskan rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada. Selanjutnya adalah adalah pemaparan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian guna untuk mengetahui seberapa penting penelitian ini dilakukan. Kemudian akan dilanjutkan dengan kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan juga kajian teori yang berguna pisau analisa dari tema ini. pada kajian teoritik akan dibahas beberapa teori tentang kebijakan, anggaran pemerintah dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi atau penyajian data dan gambaran umum obyek penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil temuan dan deskripsi obyek penelitian secara umum.

Pada keempat, yaitu pembahasan mengenai hasil temua dan analisis dari temuan yang sudah dilaksanakan dalam penelitian Hal ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Manyar dalam berbagai stakeholder dan spektrum dalam perencanaan pengalokasian anggaran dana desa dalam perspektif islam

Selanjutnya, bab kelima yaitu bab terakhir yang membahas inti sari dari penelitian ini dan membahas kesimpulan dari data teoritis maupun data lapangan

sudah dianalisis di bab sebelumnya selain itu juga berisi saran, daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memberikan gambaran tentang konklusi dari hasil penelitian atau juga disebut dengan penutup. Pada bab ini juga membahas mengenai intisari dari penelitian ini yang membahas tentang keberpihakan anggaran dana desa perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* selain itu juga terdapat saran dan rekomendasi bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang sama.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, terkait keberpihakan anggaran dalam pengembangan masyarakat di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat ini mengenai keberpihakan kebijakan dana desa di desa Manyar menunjukkan beberapa temuan, yakni: (1) Pemerintah desa dalam hal ini sebagai pelaksana dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN hanya mengalokasikan dan mengimplementasikan program sesuai pagu anggaran yang telah ditentukan. (2) Pada proses penyusunan anggaran, masyarakat selalu dilibatkan namun tidak mendapat porsi yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya atau bisa disebut bahwa proses intelegensia belum sepenuhnya optimal dalam penyusunan anggaran, meski pilihan dan desain kebijakan dan program cukup baik yang mengedepankan *isue emergency*.

(3) Pengembangan potensi masyarakat di desa Manyar menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana desa terutama pada potensi di bidang pertanian dan

perikanan. Dalam penelitian ini menunjukkan potensi utama desa Manyar adalah di sektor pertanian dan perikanan tambak. Pemerintah desa memberikan porsi penuh untuk pengembangan potensi tersebut hal tersebut juga sejalan dengan peruntukan anggaran dana desa yang harus digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 30%. (4) Dalam penyusunan peruntukan dana desa disusun berdasarkan kebutuhan mendesak dan urgen sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa hal ini sesuai dengan pandangan Alal al-Fasi tentang maqāṣid al-Syarī'ah *Qads al-Mukāllaf* (keinginan manusia) yakni dalam hal pengelolaan pemerintahan harus berorientasi kepada kemaslahatan dan demokratis. Masyarakat diberikan ruang dalam penentuan pengalokasian anggaran dana desa, meskipun pihak pemerintah desa sudah mempunyai orientasi pembangunan yang tersusun dalam visi misi kepala desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau RABDes namun masyarakat bisa memberikan aspirasi yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Terkait kewenangan pengalokasian anggaran dana desa, pemerintah desa sebagai pemegang hak untuk mendistribusikan anggaran mempunyai wewenang penuh dalam menyusun anggaran, meski begitu pemerintah desa Manyar selalu terbuka terhadap adanya masukan dari masyarakat terutama di forum yang resmi sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku yang mana proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa Manyar masuk dalam kategori model pandangan sekilas campuran sesuai dengan pandangan dari Amitai Etzioni yang mana ia mencoba memberikan tawaran teori baru yang dengan menengahi adanya pengambilan kebijakan yang mempunyai kecenderungan ekstrem seperti

model elitis dan model rasional komprehensif, dengan teori (*Mixed Scanning Theory*).

B. Saran-Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian dan temuan yang ada, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagaimana berikut:

1. Bagi pemerintah desa diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan publik khususnya kebijakan anggaran dan kaitannya dengan prinsip maqāṣid al-Syarī'ah dan pengembangan masyarakat
2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merasa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, lebih baik, dan lebih banyak lagi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan keberpihakan kebijakan anggaran dana desa. Selain itu masih banyak kajian yang perlu dilakukan secara komprehensif terkait tema ini juga melakukan proses penelitian pada topik terkait dari berbagai perspektif yang berbeda.
3. Bagi UIN Sunan Kalijaga, utamanya Pascasarjana Konsentrasi Islam, dan Kebijakan Publik, diharapkan mampu menjadi diskursus kajian dan pengembangan keilmuan dalam bidang kebijakan publik dan keilmuan Islamic Studies.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdelgafar, Basma I. *Public Policy: Beyond Traditional Jurisprudence a Maqasid Approach*, Herndon Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2018.
- Agustinus, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ahmad ar-Raisuni. *Allal Al-Fasy Aliman Wa Mufakkiran*. Cairo: Dar al Kalimat Li an Nasyr wa At Tawzi', 2014.
- Allal al-Fasi. *An-Naqd an-Dzati*. Ribath: Lajnah Nasy Turats, 1979.
- Allal al-Fasy. *Maqasid Al-Syariah Wa Mukarimuha*. Cairo: Dar as Salam, 2013.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt Reinhartnwinston, 1979.
- . *Public Policymaking*. New York: Cengane Learning, 2010.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik Konsep Perpajakan Dan Peran Baitul Mal*. Bandung, 2005.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000.
- Bintarto. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Chapra, Umar. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2000.
- Dr. Joko Widodo, M.S. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edited by Yuyut Setyorini Setiyo Wahyudi, Indro Basuki. Malang: Media Nusa Creative, 2021.

- Dreisa Trauri. *Difa' An As-Syariah Alal Al-Fasy*. Cairo: Dar Al-Kutub Al - Mashri, 2011.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. 2nd ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- . *Public Policy Analysis*. New York: Taylor & Francis, 2018.
- HAW, Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2003.
- Herbert A. Simon. *The New Science of Management Decision*. New York: Stratford Press, 1960.
- Jhingan, M.L., and D. Guritno. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Kartini, K. “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dalam Perspektif Maqashid Shariah (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang),” 2020.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17982/>.
- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Marzali, Amri. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maulana, Agung, Ahmad Rizki Zulfikar, Ayu Andini. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah,” no. 32 (2019): 68–84.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- Sha;ahuddin al-Jursyi. *Al-Maqasid Al-Syariah Baina Muhammad at-Thahir Bin*

Asyur Wa Allal Al Fasy, n.d.

Surianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Thomas A. Birkland. *An Intorduction to The Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Taylor & Francis, 2011.

Thomas R Dye. *Understanding Public Policy*. United State: Pearsin Eduction Inc, 2013.

Winardi. *Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Bulat*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 1998.

M. Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Winarno. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Edisi Revi. Jakarta: CAPS, 2014.

JURNAL

Fitriyah, Sayyidatul, Tika Widiastuti, and Sri Herianingrum. “Perbandingan Apbn Pemerintah Era Presiden Sby – Jk Dan Jokowi – Jk: Analisis Belanja Negara Perspektif Maqāsid Syari`Ah.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.15548/jebi.v4i1.219>.

Hulu, Yamulia, R Hamdani, Harahap Muhammad, and Arif Nasution. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu -Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>.

Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016): 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.

Mais, Rimi Gusliana, and Lini Palindri. “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>.

- Malempi, Lianastasia, Martha Ogotan, and Salmin Dengo. “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.” *Jurnal Administrasi Publik Unsrat* 5, no. 74 (2019).
- Ramzani,P, Ikbal, Muhammad Yasir Yusuf, and Hafas Furqani. “Model Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh (Ditinjau Dari Maqashid Syariah).” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2020): 58–81. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.627>.
- Sanisah, Siti. “Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)* 3, no. 1 (2015): 101. <https://doi.org/10.21009/jpeb.003.1.5>.
- Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. “Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.
- Tryatmoko, 5. Mardyanto Wahyu. “Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Politik LIPI* 07 (2010).
- Utomo, Selamat Joko. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA.” *Jurnal Mediatrend* 10, no. 1 (2015): 19–31. <http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/687>.
- Wahab, Abdul. “Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional).” *Jurnal Tsaqofah* 12 (2016): 167–86.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

1 (angka 2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan kedua atas perubahan UU tentang Desa.

Dokumentasi Desa Manyar, 2023